



**HIDDEN DEBT CHINA KE INDONESIA MASA PANDEMI COVID-19:
TINJAUAN ATAS PERSPEKTIF STRUKTURALIS DAN RATIONAL CHOICE
THEORY**

Oleh

Fuad Azmi¹, Emil Mahyudin², Gilang Nur Alam³, RMT Nurhasan Affandi⁴, Windy Dermawan⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran

Email: ¹Fuad.azmi@unpad.ac.id

Abstract

Covid 19 has an impact on the world economic crisis which has brought the world to the brink of the worst economic recession in the last 50 years of world economic history. This causes the state to require debt to other countries, including Indonesia. Indonesia's state debt during the pandemic continued to grow so that it was accused of "Hidden Debt" to the Chinese state from both government and non-government. Foreign debt is not a secret matter, but the state must owe it to survive. The theory used in this paper is Structuralism Theory and Rational Choice. This paper finds that hidden traps in the short term are a source of stimulus for the recovery of the economic and infrastructure sectors in Indonesia after Covid-19, but in the long term it has the potential to cause problems for Indonesia's dependence on China and a threat to economic independence. Therefore, Indonesia needs to compile a roadmap regarding economic recovery after the Covid-19 pandemic by utilizing potential foreign sources to be developed and in the nature of cooperation.

Keywords: Indonesia, China, Hidden debt, structuralism, Rational Choice

PENDAHULUAN

Coronavirus 2019 (Covid-19) muncul pertama di Tiongkok bulan Desember 2019. Pada April 2020, hampir 1,5 juta orang di seluruh dunia telah terinfeksi (Universitas Johns Hopkins, 2020). Dikutip dari Walker et al. (2020) memperkirakan kematian global berkisar dari 40 juta orang di bawah skenario tanpa mitigasi hingga 2 juta orang di bawah skenario penekanan paling sukses yang mengurangi tingkat kontak antar pribadi sebesar 75 persen. Dampak ekonomi dari Covid -19 secara tidak langsung mengakibatkan kejutan paling serius di semua negara (Hausmann, 2020). Dua hal terjadi. Pertama, pekerja terinfeksi, mengurangi kapasitas produksi. Atkeson (2020) menyatakan ketika populasi terinfeksi lebih dari 10%, infrastruktur dan perdagangan menghadapi pengurangan *staf* yang parah.

Kedua, pembatasan sangat diperlukan untuk mengurangi terjadi penularan indeks penyakit. Seperti disebutkan sebelumnya, penurunan dalam kontak sehingga 75% *interpersonal* untuk mengendalikan Covid 19 sangat diperlukan.

Pandemi Covid telah membawa dunia pada penurunan ekonomi yang sangat buruk dalam 50 tahun di era terakhir sejarah ekonomi. Tahun 2020 ekonomi dunia turun sehingga minus 3,5 persen, seperti dikutip oleh Dana Moneter Internasional (IMF) melalui publikasinya "*The World Economic Outlook*" (2021), menyatakan bahwa angka tersebut jauh lebih buruk dari krisis keuangan dunia pada tahun 2009 dan di Asia tahun 1998. Indonesia sendiri mengalami masa krisis ekonomi pada saat masa pandemi nilai tukar mata uang Indonesia terus melemah terhadap dolar AS sejak Februari 2020.



Pelemahan mata uang Indonesia didorong oleh kekhawatiran investor global atas penyebaran Covid -19. Per 30 Maret 2020, nilai tukar mata uang Indonesia bergerak kurang lebih 16.155 per USD hingga 16.320 per USD. Jika dihitung pada awal tahun, mata uang Indonesia melemah 17,7 persen. Sementara berdasarkan kurs dalam Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* (Jisdor), Rupiah Bank Indonesia (BI) ditetapkan pada 16.336 per dolar AS, melemah jika dibandingkan dengan acuan sebelumnya di 16.230 per dolar AS. Seperti yang dicatat oleh IMF, wabah Covid-19 telah menyebabkan terjadinya krisis ekonomi dan keuangan global (Bank Indonesia, 2020).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat turun sehingga 3 triliun dengan waktu yang berturut-turut mencapai minus 5,3%. Secara terhitung, Indonesia turun menjadi minus 2,1% (BPS, 2021). IMF sangat optimistis kalau ekonomi akan tumbuh sebesar 3,9 persen pada tahun 2021, bahkan mempertimbangkan gelombang Delta. Langkah-langkah fiskal dan non-fiskal difokuskan pada: memperkuat ketahanan sektor-sektor yang terkena dampak pandemi; menjaga daya beli masyarakat; dan menjamin kelangsungan usaha. Kebijakan tersebut memungkinkan percepatan belanja publik, terutama selama kuartal pertama tahun 2020, dan untuk realokasi sumber daya anggaran, yang awalnya berkonsentrasi pada perawatan kesehatan dan bantuan sosial daripada bahan non-darurat dan belanja modal. Anggaran 2022, yang diberitahu oleh persiden Joko Widodo beberapa minggu yang lalu, untuk bisa meningkatkan perekonomian agar bisa naik 5,5% pada tahun berikutnya.

Untuk mengatasi tantangan Covid-19, beberapa inisiatif dukungan, termasuk tiga paket stimulus fiskal sementara dan langkah-langkah kebijakan moneter, dilakukan tanpa penundaan untuk meminimalkan dampak ekonomi dan menopang pertumbuhan. Paket

stimulus pertama senilai Rp 10,4 triliun, atau 0,06% dari PDB, tampaknya sebagian besar terdiri dari reklasifikasi dan pemuatan awal komitmen belanja sebelumnya, diumumkan pada minggu 24 Februari 2020. Paket kedua senilai Rp 22,9 triliun atau 0,19% dari PDB diumumkan pada 13 Maret 2020 untuk mendorong belanja dan perdagangan, serta menjaga daya beli dan menjaga pasokan pangan melalui langkah-langkah kebijakan fiskal, non-fiskal, sektor keuangan, dan kebijakan pangan. Paket ketiga senilai Rp 405,1 triliun diumumkan pada 31 Maret 2020. Di bawahnya, pajak penghasilan badan akan dikurangi 3 poin persentase menjadi 22% selama 2020-21 dan menjadi 20% mulai 2022. Selain itu, Rp70 triliun akan digunakan untuk insentif pajak dan dukungan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Selanjutnya, paket tersebut mencakup Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial (termasuk bantuan makanan dan diskon dan keringanan listrik untuk 10 juta rumah tangga).

Oleh sebab itu, dalam upaya mengejar anggaran paket stimulus Indonesia sangat memerlukan kerjasama dengan negara lain untuk dapat memulihkan kembali keadaan ekonomi negara terutama pada negara China. Semenjak awal mula berlangsungnya Covid-19 Indonesia dan China telah melalui berbagai macam kerjasama melalui berbagai bidang seperti ekonomi, keamanan, dan bidang lainnya. Sehingga secara tidak langsung ini menimbulkan terjadinya *Hidden Debt* yakni Hutang tersembunyi Indonesia kepada negara China oleh instansi non pemerintah dikarenakan pembekakan anggaran yang terpaksa harus meminjam kepada negara lain. Seperti yang telah diberitakan akhir akhir ini bahwa Indonesia memiliki hutang yang sangat besar kepada China dan sudah tidak asing di mata negara lain karena berita terkait hal tersebut sudah cukup terkenal di kaca Internasional.



Indonesia berhutang US\$17,28 miliar dalam “*Hidden Debt*” ke China, lebih dari empat kali lipat dari US\$3,90 miliar dalam bentuk hutang negara yang dilaporkan, sebuah studi baru-baru ini menemukan, menunjukkan kurangnya pelaporan kewajiban negara kepada kekuatan ekonomi Asia. Studi yang sudah dilakukan oleh *AidData*, sebuah laboratorium penelitian pembangunan internasional yang berbasis di *College of William & Mary* di Amerika Serikat, mencatat bahwa alih-alih dikontrak atau dijamin secara formal oleh pemerintah pusat, hutang tersembunyi telah dikeluarkan untuk BUMN. Sebagian besar untuk mendanai proyek-proyek di bawah *Belt and Road Initiative* (BRI).

LANDASAN TEORI

Strukturalisme dan *Rational choice theory*

Strukturalisme merupakan perspektif yang berfokus pada kekuatan ekonomi dan konflik kelas sosial. Perspektif ini berangkat dari pemikiran Karl Marx yang kemudian dikembangkan oleh akademis ataupun aktivis sehingga mempunyai ruang lingkup yang lebih besar. Walaupun *structuralist* tidak sejalan dengan sosialis seperti yang ada di dalam pemikiran Marxist, mereka percaya bahwa sistem kapitalis global saat ini tidak adil dan eksploitatif, dan ini bisa diperbaiki dengan suatu sistem yang bisa mendistribusikan economic output dengan cara yang lebih adil. Sistem kapitalis global, sebagai struktur dalam perspektif *structuralism*, berperan sebagai tatanan atau sistem yang membentuk sebuah masyarakat.

Strukturalisme juga merupakan perspektif kritik terhadap teori marxisme, ia dicirikan dengan tiga hal. Yaitu mereka berpendapat bahwa memang sebuah hubungan ekonomi global terbentuk dan dirancang untuk menguntungkan kelas sosial tertentu, dengan itu akan terbentuk suatu ‘sistem dunia’ yang memang pada dasarnya tidak adil. Strukturalisme juga memberikan

kritik penting kepada liberalisme dan realisme. Strukturalisme menekankan pada karakteristik perekonomian global yang dianggap rawan terjadinya perselisihan/konflik, hubungan dominasi dan dependensi yang bersifat struktural daripada anarki sistem negara. Ketiga, perspektif strukturalisme menyoroti hubungan ekonomi-politik, strukturalisme juga menekankan pentingnya struktur hubungan yang di dalamnya berlangsung interaksi politik dan ekonomi dan mekanisme yang mendukung struktur yang sama tersebut.

Sedangkan selanjutnya yaitu Teori Pilihan Rasional atau *Rational Choice Theory* merupakan sebuah kerangka pemikiran untuk mencoba merancang model perilaku dan memahami perilaku sosial dan ekonomi. Teori tindakan rasional ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki preferensi dan pilihan yang berbeda masing-masingnya, dan oleh karena itu teori ini berfokus terhadap penentu pilihan masing-masing pihak. Teori pilihan rasional dapat diterapkan pada berbagai bidang, termasuk ekonomi, psikologi, dan filsafat dan termasuk dari pilihan negara untuk memilih akan meminjam uang atau melakukan pinjaman hutang ke negara lain. Beberapa asumsi dari *Rational Choice Theory* diantaranya semua tindakan rasional dan dibuat karena mempertimbangkan biaya dan imbalan, Imbalan dari suatu hubungan atau tindakan harus lebih besar daripada biaya untuk tindakan yang harus diselesaikan, ketika nilai berkurang di bawah nilai biaya yang dikeluarkan pihak tersebut akan menghentikan tindakan atau mengakhiri hubungan, dan Individu akan menggunakan sumber daya yang mereka miliki untuk mengoptimalkan imbalan mereka. (Ilzaq, 1995)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada saat sebelum pandemi Covid-19, Indonesia mempunyai perekonomian yang



bertumbuh sangat tinggi, perekonomian tersebut sesuai yang dirangsangkan oleh pemerintah dengan pembangunan yang maksimal melalui anjuran nasional. Sejak akhir tahun 1970-an pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu kurang serta pendapatan per kapitanya cenderung rendah sehingga untuk menungjang ekonomi Indonesia perlu bantuan dari luar negeri karena tidak cukup untuk membiayakan dengan penghasilan sendiri. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan tetapi tidak dibantu untuk menutupi hutang luar negeri. Hutang luar negeri Indonesia seiring berjalannya waktu makin bertambah, peminjaman tersebut diterima dalam bentuk berupa hadiah serta *soft loan* berasal dari para negara dan Lembaga-forum nasional, baik melalui kerjasama bilateral maupun multilateral (IGGI dan CGI).

Dengan menggunakan biaya hutang luar negeri, perekonomian Indonesia semakin berkembang. Sehingga dapat menunjang kepentingan infrastruktur, dan pemerintah juga mulai memakai pinjaman melalui organisasi dan perusahaan swasta Internasional. Dengan begitu, Indonesia dapat menarik para investor secara tidak langsung sektir pemabngunan didirikan yang menunjang perusahaan swasta untuk meminjam kepada luar negeri tanpa dukungan. Sehingga, Pada tahun 1984 terjadinya krisis ekonomi yang menyebabkan pengeluaran bertambah sangat besar sehingga mencapai 68,67%. Secara tidak langsung terjadinya keniakan cicilan hutang kepada negara penyumbang sebesar 88,55% yang berujung pada nilai rupiah yang melemah terhadap dolar AS.

Semenjak terjadinya krisis pada ekonomi di Indonesia, Indonesia mulai menggunakan dana donasi berasal dari luar negari yang sama saja jika dihitung menjadi penyebab hutang baru. Jika Indonesia memanfaatkan penghasilan domestic seperti

memanfaatkan pengelolaan pajak maka dimasa depan akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Namun, meskipun negara tidak lepas dari hutang akan tetapi sangat membantu untuk menutup hutang Indonesia yang sudah membengkak menjadi berkurang sedikit demi sedikit meskipun tidak secara sempurna. Jangka Panjang untuk berhutang ke luar negeri justru akan menjerumus negara Indonesia pada debitor dengan krisis hutang luar negeri yang berjangka Panjang dan akan sangat berdampak bagi masyarakat karena hutang luar negeri terus membengkak.

IMF dan Hutang Luar Negeri

IMF turut memberikan saran kepada negara-negara peminjam hutang luar negeri terutama kepada negara berkembang dimana IMF menjelaskan Krisis Covid-19 menghadirkan tantangan dalam pengelolaan hutang negara. Di banyak negara, tekanan hutang cenderung melebihi pengalaman masa lalu di sejumlah dimensi, termasuk potensi peningkatan persyaratan pembiayaan, ketegangan dalam fungsi pasar, dan, untuk negara berkembang dan berkembang (EMDE), penurunan permintaan dan modal eksternal. Pihak pengelola hutang negara perlu bersiap untuk memanfaatkan semua elemen dari buku pedoman krisis mereka, berpotensi lebih besar dari sebelumnya dan menerapkan penilaian untuk menavigasi dengan hati-hati antara dislokasi sementara dan perubahan permanen. Krisis dapat menyebabkan pihak berwenang mengambil langkah-langkah yang menyimpang dari praktik pengelolaan hutang yang sehat. Berangkat dari praktik yang sehat, manajer hutang perlu mengingatkan otoritas fiskal dan moneter terhadap risiko yang ditimbulkan oleh penyimpangan tersebut dan mencoba meminimalkan risiko tersebut. Penting bagi pembuat kebijakan untuk memperjelas bahwa setiap penyimpangan tersebut harus bersifat sementara, bersiaplah untuk melepaskannya



segera setelah masa-masa yang luar biasa berakhir dan mengkomunikasikannya secara efektif kepada pemangku kepentingan pasar.

Para pembuat kebijakan Hutang Luar negeri akan menghadapi peningkatan biaya pemerintah yang signifikan karena terjadinya krisis pandemi Covid-19. Beberapa negara mungkin menghadapi biaya pembiayaan yang lebih tinggi di seluruh spektrum jatuh tempo, yang tidak dapat diubah melalui operasi pengelolaan hutang. Sementara beberapa negara maju mungkin mengalami peningkatan permintaan untuk surat berharga pemerintah, banyak negara berkembang mungkin menghadapi penurunan permintaan obligasi pemerintah (terutama dari bukan penduduk) sebagai akibat dari penghindaran risiko yang lebih tinggi. Persepsi pasar tentang risiko kredit akan didorong oleh persyaratan pembiayaan yang lebih tinggi dan antisipasi penurunan dinamika hutang negara. Faktor-faktor tersebut dapat memmanifestasikan dirinya melalui beberapa sebab akibat. Pertama, meningkatnya kebutuhan pembiayaan pemerintah pusat (CG) sebagai akibat dari kebutuhan pengeluaran yang lebih tinggi dan kekurangan pendapatan. Kedua, menekankan keuangan publik dan cadangan devisa yang menimbulkan keraguan tentang kapasitas pemerintah pusat untuk membayar hutangnya yang ada.

Ketiga peningkatan atau kebutuhan pembiayaan baru dari pemerintah daerah dan badan usaha milik negara. Keempat, realisasi kewajiban kontinjensi implisit dan eksplisit, seperti *call on government guarantee*; dan - potensi likuiditas berjalan menciptakan dislokasi di pasar obligasi domestik. Negara-negara berpenghasilan rendah tanpa akses ke pembiayaan pasar atau dengan pasar obligasi pemerintah domestik yang kecil kemungkinan akan membutuhkan pembiayaan eksternal tambahan untuk menutupi peningkatan pengeluaran yang disebabkan oleh Covid-19 dan defisit fiskal.

Mereka yang memenuhi syarat untuk pinjaman lunak mungkin berusaha untuk mempercepat pencairan dari kreditur resmi dan LKI, termasuk dengan mengakses fasilitas tipe darurat. Jika memungkinkan, peminjam dapat memanfaatkan inisiatif pengurangan hutang G20, yang memungkinkan negara-negara untuk melakukan penangguhan pembayaran hutang oleh kreditur resmi bilateral.

Dalam mengembangkan respons terhadap krisis, negara-negara juga dapat memanfaatkan bantuan teknis dan pengembangan kapasitas dalam pengelolaan hutang, yang dapat diberikan dari jarak jauh. Di bawah *Debt Management Facility* (DMF), dan melalui inisiatif peningkatan kapasitas yang didukung secara bilateral, IMF dan Bank Dunia berusaha membantu negara-negara untuk memperkuat lembaga, proses, dan kapasitas pengelolaan hutang mereka untuk mengurangi kerentanan terkait hutang. Hal selanjutnya yang direkomendasikan oleh IMF kepada negara berkembang adalah merevisi strategi pengelolaan hutang dan rencana pinjaman tahunan, selain itu penggunaan Buffer tunai juga harus diperhatikan, negara harus menghindari pembiayaan dari bank sentral dan pentingnya menjalin hubungan dengan investor dan komunikasi pasar. Selain itu dalam koordinasi kelembagaan IMF juga menggaris bawahi koordinasi fiskal yang tepat dan akurat, kebijakan moneter yang baik, potensi peran dan tanggung jawab baru untuk manajer hutang dan sebagainya. hal ini dilakukan IMF untuk membantu negara dalam pengelolaan hutang di masa pandemi Covid-19.

Hutang Luar Negeri Indonesia di Masa Pandemi Covid-19

Terbentuknya IGGI (*Intergovernmental Group on Indonesia*) menjadi sebuah awal dari politik hutang luar negeri Indonesia di masa orde baru. IGGI merupakan sebuah organisasi atau kelompok



yang dibentuk di tahun 1967 dan dibentuk dengan tujuan membiayai pembangunan ekonomi Indonesia terkhusus saat terjadinya penurunan ekonomi Indonesia, anggota dari IGGI terdiri dari negara maju dan badan keuangan internasional. pembahasan yang menyangkut bantuan maupun dukungan kepada Indonesia dikoordinasikan IGGI dan nantinya dibentuk suatu pertemuan yang menyatukan antara pemerintah Indonesia dan negara lain yang memberikan bantuan. Selain itu dari itu Indonesia akan menyampaikan hasil-hasil, program-program selanjutnya dan berbagai hal yang berkaitan dengan pemberian dana melalui IGGI.

Hal tersebut menjadi permulaan kehadiran modal asing yang menjadi bagian yang tidak dapat atau sulit dipisahkan dari pembangunan Indonesia. Hutang luar negeri selalu diletakkan didepan atau menjadi prioritas dalam struktur pembiayaan namun dalam pelaksanaannya atau kenyataannya, pinjaman dana yang berasal dari luar negeri didasarkan dengan kriteria pokok dan tujuannya untuk menyelaraskan antara kebutuhan bagi pinjaman dana luar negeri dengan politik luar negeri yang prinsipnya bebas dan aktif. Hatta (1976) mengutip bahwa kredit pembangunan dari luar negeri haruslah kredit dengan rentang waktu panjang dan rente yang minim yang tidak boleh lebih dari 3 persen. Atas kriteria tersebut Hutang Luar Negeri memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan Indonesia dan menyebabkan ikut bertambah atau naiknya pengeluaran dari tahun ke tahun.

Perkembangan hutang luar negeri Indonesia terus menurun meningkat meskipun laju pertumbuhan ekonomi cukup pesat. sejak akhir tahun 1970-an tercatat ekonomi Indonesia bergerak naik. namun pendapatan perkapita Indonesia tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi tersebut tidak dibiayai dengan uang

sendiri melainkan menggunakan bantuan modal asing. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kenaikan hutang luar negeri Indonesia kepada negara lain seperti Amerika Serikat, China, India, Singapura, dan lainnya. Kenaikan ekonomi Indonesia ini tidak dijalankan dengan upaya penurunan hutang luarnegeri, dimana hal ini terus dibiarkan dan tidak mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Kontribusi swasta yang begitu bebas terutama didukung oleh *Free Trade* malah menyebabkan struktur hutang luar negeri mengalami kenaikan yang begitu pesat. Masa pandemi Covid-19 seharusnya pemerintah menyadari atas progress hutang luar negeri Indonesia yang sudah mengalami kenaikan, namun pada kenyataannya pemerintah tetap tidak menyadari dan menanggapi serius mengenai hal ini. istilah "*Debt-Trap*" kini melayang kepada China yang telah melakukan banyak upaya untuk menawari pinjaman kepada negara lain dan disebut-sebut melakukan "*trap*".

Revrisond Baswir mengatakan bahwa hutang negara Indonesia mengalami kenaikan hampir setiap tahun diakibatkan oleh perilaku boros yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menggunakan anggaran negara, hingga korupsi yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hutang luar negeri yang diperoleh oleh Indonesia tidak ada kejelasan manfaat dan penggunaannya tersebut dan hal itu dinilai sangat tidak efektif bagi Baswir. Selain itu juga ada kebijakan Indonesia dimana mengambil hutang luar negeri untuk menutupi hutang luar negeri yang jatuh tempo. selain itu upaya untuk membayarnya juga dilakukan dengan memberlakukan kenaikan harga pajak, mencabut subsidi BBM dan elpiji atau menaikkan biaya lain yang pada akhirnya menyengsarakan masyarakat Indonesia. Tercatat data menunjukkan bahwa di tahun 2015 hutang Indonesia kepada China mulai naik dengan cepat mencapai 73,79 persen, di



tahun 2014 senilai 7,86 miliar dolar dan menaik lagi hingga 15,15 milyar. Selanjutnya sempat turun di 2017 dimana tercatat di angka 18,11 miliar. Sebelum pandemi tercatat hutang luar negeri Indonesia ke China sebesar 19 miliar. Memasuki pandemi di tahun 2020 tercatat hutang Indonesia sebesar 20,65 miliar dolar. Selanjutnya di tahun 2021 tercatat hutang Indonesia kepada China sebanyak 21,24 miliar dolar. Kenaikan di tahun pandemi tercatat lebih besar daripada sebelumnya, karena terjadi lonjakan yang besar. Dengan itu Indonesia harus lebih berhati-hati dan bijak dalam merencanakan, mengelola, dan mengalokasikan hutang luar negeri terutama ke negara China.

China's Debt Trap

Istilah "*Debt Trap*" dipromosikan oleh Brahma Chellaney untuk menggambarkan apa yang disebutnya praktik pemberian pinjaman hutang dari China yang memberikan pinjaman kepada negara dengan ekonomi menengah ke bawah. Teori *debt-trap diplomacy* adalah bahwa negara tersebut dengan sengaja memberikan pinjaman yang berlebihan kepada negara debitur dengan maksud untuk mendapatkan konsesi ekonomi atau politik dari negara debitur ketika negara tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya. Persyaratan pinjaman biasanya tidak dipublikasi dengan teres terang. Uang pinjaman biasanya membayarkontraktor dari negara kreditur.

Kebijakan luar negeri negara China itu dikenal dengan "*Debt Trap*" diakibatkan apabila negara peminjam tidak membayar hutangnya, mereka akan mendapat tekanan dan pengaruh China yang tentunya menguntungkan China. China dituduh telah sengaja membuat strategi yang mengakibatkan terjadinya hal tersebut dan memerlukan negosiasi rahasia dan penetapan harga non-kompetitif pada proyek-proyek di mana penawaran harus ditutup dan kontrak harus diberikan kepada perusahaan milik

negara atau perusahaan milik negara China yang mengenakan harga jauh diatas pasar. Banyak negara telah mengkritik persyaratan peminjaman uang ke negara China yang disebut memberikan tingkat bunga tinggi, misalnya pada kasus Tonga yang meminjam untuk membangun infrastruktur tetapi malah mengalami krisis baru kepada Bank Eksim China akibat tingginya bunganya. Hal ini menjadi suatu tantangan dan peringatan bagi pembuat kebijakan negara untuk lebih berhati-hati dan bijak dalam melakukan pinjaman kepada negara China.

Masa Depan Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia Pasca Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang masih berlanjut hingga saat ini dan bahkan terdapat berbagai varian baru karena adanya mutasi dari virus Covid-19 tentunya memberikan dampak yang besar kepada seluruh dunia. Perekonomian Indonesia juga masih dalam proses untuk mencapaikestabilan seperti sedia kala. Perekonomian yang menurun ditambah dengan urgensi berbagai alat kesehatan yang cukup memakan biaya membuat Indonesia harus berhutang kepada negara lain. Tanpa kita sadari, negara kita sendiri Indonesia ternyata sudah memiliki hutang ke Cina sejumlah 17,28 miliar dolar AS atau jika dirupiahkan menjadi 245,3 triliun. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan bagaimana Indonesia akan membayar hutang-hutang tersebut dan bagaimana langkah yang diambil pemerintah di masa depan. Hutang Indonesia yang tercatat oleh AidData ini sebesar 245,3 triliun rupiah ini sendiri merupakan hutang yang dimiliki Indonesia pada periode 15 Oktober 2021.

Pada periode Agustus 2021, Statistik hutang Luar Negeri Indonesia mencatat bahwa Indonesia juga memiliki hutang yang cukup besar. Hutang pada periode Agustus ini berjumlah 21,13 miliar dolar, secara nominal mencakup \$1,67 miliar hutang yang dimiliki oleh pemerintah dan \$19,46 miliar hutang yang dimiliki oleh perusahaan swasta.



Seorang ahli ekonomi Drajad Wibowo, menjelaskan bahwa hutang ini telah diekspansi. Beliau menjelaskan bahwa ekspansi ini ekspansi yang besar. Hal ini dikarenakan jumlahnya yang mencapai 13,25 miliar dollar atau sebesar 187,55 triliun rupiah. Besar nya jumlah ekspansi ini juga dibandingkan oleh anggaran Kemhan dan Kemenkeu pada APBN 2021 yaitu sebesar 162,21 triliun rupiah. Beliau menekankan bahwa ekspansi yang besar ini harus diteliti. Kemana saja ekspansi tersebut disalurkan. Menurut nya, hal ini harus dijelaskan agar masyarakat juga dapat mengetahui mana yang benar (CNN Indonesia, 2021b).

Hutang ini sendiri merupakan hutang yang tidak terdaftar di hutang pemerintah. Hal ini menyebabkan hutang ini dapat terlihat sebagai hutang yang disembunyikan. Hutang tersembunyi ini disampaikan oleh sebuah lembaga riset AidData. AidData merilis laporan dengan judul '*Banking on the Belt and Road: Insight from a new global dataset of 13.427 chinese development projects.*' Dalam laporan tersebut, mereka membahas 13.427 proyek di 165 negara, dengan total US\$843,0 miliar. Pada laporan AidData ini, mereka menjelaskan bahwa Indonesia memiliki hutang tersembunyi sejumlah 385 miliar dollar. Tidak hanya hutang tersembunyi saja, nyatanya Indonesia juga tercatat menerima pinjaman dari China sejumlah 4,42 miliar dollar yang jika dirupiahkan sebesar 62,76 Triliun Rupiah. Pinjaman ini diberikan oleh Cina melalui skema *official development assistance* atau dapat disebut ODA. AidData juga menjelaskan bahwa terdapat skema lain yang digunakan oleh Cina untuk meminjamkan dana sebesar 29,96 miliar dollar yang jika dirupiahkan menjadi 425,43 triliun rupiah, melalui skema *other official flows* (OFF).

Hutang-hutang ini juga tidak terdaftar di daftar hutang pemerintah karena hutang ini diarahkan melalui bank milik negara. Hutang

yang terlihat seperti hutang yang tersembunyi ini tentunya membuat keresahan. Banyak masyarakat bertanya-tanya mengapa pemerintah menutupi hutang-hutang tersebut. Kenapa hal ini tidak diberikan transparansi oleh pemerintah? Kenyataannya, pemerintah tidak menutupi hutang-hutang ini kepada masyarakat. Melainkan, pemerintah memang tidak berhubungan dengan hutang-hutang ini (CNN Indonesia, 2021a). Staf Khusus Menteri Keuangan sendiri sudah memberikan pernyataan. Yustinus Prastowo menyatakan bahwa hutang yang disebutkan sebagai hutang tersembunyi oleh AidData nyata nya bukan pemerintah yang bermaksud untuk tidak melaporkan hutang-hutang tersebut. Hutang tersembunyi atau yang bisa disebutkan sebagai *Hidden Debt* adalah hutang yang bukan merupakan tanggung jawab pemerintah. Hal ini dikarenakan hutang-hutang yang dibuat ini merupakan hutang bisnis ke bisnis, yang berarti bahwa tanggung jawab atas hutang ini ditanggung oleh perusahaan yang melakukan hutang tersebut. Tanggung jawab tentunya juga penuh di tangan perusahaan yang melakukan pinjaman/hutang.

Akan tetapi, jika terjadi wanprestasi atau gagal bayar dimana perusahaan tersebut tidak mampu untuk membayar hutang tersebut. Pemerintah memiliki risiko untuk menanggung hutang-hutang tersebut. Jika terdapat hutang luar negeri yang ditarik, hutang itu akan tercatat dalam Statistik Hutang Luar Negeri. Statistik Hutang Luar Negeri ini sendiri sudah tersusun agar dapat dibagikan oleh Bank Indonesia. Hal ini berarti bahwa hutang luar negeri yang dimiliki Indonesia juga dapat dilihat oleh publik dan sudah terjadi transparansi. Maka dari itu, pemerintah tidak menutupi hutang-hutang yang mereka lakukan. Hutang dengan nominal yang cukup besar itu tentunya juga membuat masyarakat berpikir. Bagaimana negara kita dapat mengelola hutang-hutang



yang kita miliki. Pemerintah ketika berhutang tentu nya memperkirakan kemampuan negara kita juga untuk membayar hutang tersebut. Maka dari itu, negara juga tentu memiliki rencana-rencana di masa depan untuk membayar hutang-hutang yang telah dibuat. Pemerintah tentunya memiliki beragam cara untuk membayar hutang-hutang mereka.

Salah satu cara yang digunakan Indonesia untuk membayar hutang-hutang ini merupakan pengambilan pajak. Masalah nya adalah Indonesia sekarang sedang mengalami turun nya tren pajak. Menteri keuangan sendiri, ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa Indonesia sanggup untuk membayar hutang jika rakyat membayar pajak. Kenyataannya, meskipun amnesti pajak sudah diadakan, tren pajak masih terus menurun. Hutang yang dimiliki Indonesia ini juga semakin terasa dikarenakan Surat Berharga Negara yang sekarang memberikan keterangan yang cenderung tidak terlalu jelas. Ibu Sri Mulyani bahkan khawatir bahwa akan terjadi kondisi dimana negara berhutang untuk membayar hutang. Pemerintah tentunya tidak berdiam saja melihat kesadaran masyarakat mereka yang rendah terhadap pembayaran pajak. Berdasarkan penjelasan Direktorat Jenderal Pajak yang dijelaskan di situs mereka, Direktorat Jenderal Pajak sudah menentukan strategi-strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat kita. Pertama mereka memiliki strategi untuk melakukan sosialisasi.

Strategi ini dilakukan untuk memberikan mindset yang tepat kepada masyarakat bahwa pajak yang mereka bayarkan adalah untuk mereka sendiri. Ketika masyarakat sudah memilikipandangan positif, tentu mereka akan memiliki kesadaran untuk membayar pajak dan membantu meningkatkan tren membayar pajak. Contoh dari sosialisasi ini dapat dicontohkan dengan mendatangi kantor-kantor dan pemerintah daerah yang berlokasi di sekitar wilayah kerja. Lalu mereka dapat melakukan

sosialisasi untuk beberapa pejabat yang menjabat di kantordaeerah tersebut. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan menunjukkan keterkaitan pajak terhadap hal yang mempengaruhi mereka, contohnya adalah Surat Pemberitahuan Tahunan mereka (Direktorat Jenderal Pajak, 2012). Tentunya, pemerintah tidak hanya mengandalkan pendapatan pajak untuk melunasi hutang-hutang mereka. Hal ini diidentifikasi oleh salah seorang ekonom Indonesia, Bhima Yudhistira. Bhima Yudhistira sendiri merupakan direktur dari *Center of Economic and Law Studies*. Beliau sendiri menyatakan bahwa dengan hutang-hutang yang dimiliki pemerintah kita sekarang akan membutuhkan paling tidak sampai tahun 2070 untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Hal ini tentunya bukan kabar baik bagi pemerintah kita, sudah jelas bahwa pemerintah harus mencetuskan strategi lain untuk melunaskan hutang-hutang tersebut.

Pemerintah juga perlu melakukan belanja negara yang produktif. Hal ini dikarenakan belanja negara yang produktif dapat membuat ekonomi tumbuh. Ekonomi yang tumbuh sendiri dapat membuat produk domestik bruto negara bisa mengimbangi kenaikan hutang. Nyata nya, belanja pemerintah sekarang masih kurang produktif dan efektif. Hal ini juga dinyatakan oleh Bhima dengan bukti bahwa belanja pegawai yang rata-rata sudah memakan 32,4 persen dari total belanja pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah juga harus bercermin pada diri sendiri, mengefisienkan pengeluaran, dan pada saat yang sama meningkatkan kesadaran masyarakat terkait masalah perpajakan. Negara juga dapat membayar hutang-hutang mereka dengan hal lain. Salah satu hal yang perlu kita perhatikan juga merupakan aset yang dimiliki negara kita. Aset negara sendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, aset negara merupakan suatu barang bergerak



atau tidak bergerak milik negara yang memiliki nilai ekonomi.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sendiri, sudah mencatat nilai aset-aset yang dimiliki oleh negara kita. Nilai aset-aset ini sendiri dicatat pada periode akhir Desember 2020, dimana nilainya sudah mencapai 11.098,67 triliun rupiah. Nilai ini juga ternyata sudah meningkat dibandingkan pada tahun 2019 yang masih bernilai 10.400 triliun rupiah. Aset-aset ini juga terdiri dari aset yang berbentuk barang milik negara dan yang non barang milik negara. Aset negara yang berjumlah sangat besar ini tentunya harus diatur dengan benar untuk mempertanggungjawabkannya. Salah satu penggunaannya dapat kita arahkan sebagai pilihan untuk membayar hutang-hutang yang dimiliki oleh negara kita (CNBC Indonesia, 2021). Hutang tersembunyi yang dimiliki negara kita ini nyata-nyata bukan hutang yang memang ditujukan untuk disembunyikan oleh negara kita.

Tidak semua hutang-hutang ini pertanggungjawabannya diserahkan ke pemerintah. Perusahaan-perusahaan swasta yang turut berpartisipasi dalam hutang ini juga memiliki tanggung jawab untuk membayarnya. Tentu, pemerintah kita mempersiapkan beragam strategi untuk membayar hutang-hutang ini. Strategi ini dapat kita lihat dari upaya peningkatan kesadaran pembayaran pajak kepada masyarakat yang dilakukan untuk meningkatkan tren membayar pajak. Pemerintah tentu juga harus melakukan refleksi dan mengatur pengeluaran mereka agar lebih efektif dan produktif. Tidak lupa pemerintah harus mengkalkulasikan penggunaan aset mereka agar dapat menjadi strategi untuk membayar hutang negara juga. Maka dari itu, dibutuhkan upaya dari masyarakat dan pemerintah agar kita semua bisa terbebas dari hutang-hutang tersebut.

KESIMPULAN

Selama masa pandemi Covid 19, hutang luar negeri bukan masalah yang asing lagi, bahkan selama pandemi ini memang banyak negara yang memiliki hutang luar negeri karena krisis ekonomi yang mengharuskan negara untuk meminjam kepada negara lain, termasuk Indonesia. Hutang luar negeri Indonesia memang sudah ada pada saat sebelum pandemi melanda dan sudah cukup besar dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur, bahkan kebutuhan negara. Namun yang menjadi permasalahan bahwa hutang luar negeri Indonesia bukan turun melainkan terus bertambah pada masa pandemi dikarenakan kebutuhan yang lebih tinggi apalagi untuk tenaga medis. Hal tersebut telah memicu terjadinya peminjaman berlebih kepada negara lain baik dari pemerintah maupun perusahaan swasta. Indonesia memiliki hutang luar negeri yang bisa dibilang tergolong sangat tinggi kepada salah satu negara yakni China.

Penelitian ini menemukan bahwa hutang Indonesia kepada China semakin membengkak dikarenakan sebelum pandemi Indonesia telah menjalin perjanjian kerjasama dengan China *Free Trade*. Pada saat pandemi ini, Indonesia terpaksa melalui *Hidden Debt* kepada China untuk menutup hutang kita bahkan ke negara China juga. Namun, tidak semudah itu untuk melakukan penguasaan terhadap negara lain melainkan Indonesia terus berusaha untuk menutup hutang dan *hidden debt* kepada negara China dengan memberdayakan aset-aset yang dimiliki oleh negara. Pemerintah juga terus mencoba untuk mengatur penghasilan dalam negara seperti pengeloaan pajak dan pengeluaran yang lebih minim agar bisa menutup hutang secara maksimal



.....
DAFTAR PUSTAKA

- [1] Suryahadi, A., Al Izzati, R., Suryadarma, D. (2020). The Impact of COVID-19
- [2] Atmadja, A. S. (2000). Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia: Perkembangan dan Dampaknya. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 2, No. 1*.
- [3] Atje, R., & Gaduh, A. B. (1999). Indonesia-China Economic Relations : An Indonesian Perspective. *Economics Working Paper Series*, wpe052(September 1999), 1–24.
- [4] BPK. (2010). Hutang Luar Negeri. *Ditama Binbangkum*, 3–9.
- [5] CNBC Indonesia. (2021, October 26). *Waw! Aset Kekayaan RI Sudah Tembus Rp 11.000 T*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211026100658-4-286539/waw-aset-kekayaan-ri-sudah-tembus-rp-11000-t>
- [6] CNN Indonesia. (2021a, June 24). *Hutang Indonesia ke China Melesat 479,45 Persen dalam 10 Tahun*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210624110615-532-658791/hutang-indonesia-ke-china-melesat-47945-persen-dalam-10-tahun>
- [7] CNN Indonesia. (2021b, October 15). *Diam-diam, RI Nghutang Rp245 Triliun dari China*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211015135435-532-708288/diam-diam-ri-nghutang-rp245-triliun-dari-china>
- [8] Direktorat Jenderal Pajak. (2012, January 9). *Membangun Kesadaran Dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak / Direktorat Jenderal Pajak*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>
- [9] Dhiani, M., Harahap, M., Sarjana, S. P., & Utara, U. S. (2008). Mempengaruhi Hutang Luar Negeri Indonesia. *Usu E_Repository*, 8.
- [10] *Hidden Debt: Solutions to Avert the Next Financial Crisis in South Asia*. (2021, June 29). Diambil kembali dari The World Bank: <https://www.worldbank.org/en/region/sar/publication/south-asia-hidden-debt>
- [11] Henri. (2018). 濟無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 18(2), 170–178.
- [12] International Monetary Fund. (2020). *Debt Management Responses to the Pandemic*. *Mcmdm*, 1–13.
- [13] Mcbeth, John. (2021, October 18). *Asia Times*. Diambil kembali dari Hidden China debts come to the fore in Indonesia.
- [14] Kemenkeu RI. (n.d.). *Menjawab Hutang*. Retrieved December 24, 2021, from <https://www.kemenkeu.go.id/menjawabhutang>
- [15] Maswood, J. (2000). Introduction To International Political Economy. In *International Political Economy and Globalization*. https://doi.org/10.1142/9789812384805_0001
- [16] *Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia*. *SMERU Working Paper*.
- [17] Prihartini Budi AstutiArya, Samudra Mahardhika. (2020). COVID-19: How does it impact to the Indonesian economy? *ISSN-Jurnal Inovasi Ekonomi*.
- [18] Putri, C. A. (2021, August 30). *Hutang RI Menumpuk, Bagaimana Cara Bayarnya Bu Sri Mulyani?* <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210830100610-4-272160/hutang-ri-menumpuk-bagaimana-cara-bayarnya-bu-sri-mulyani/4>
- [19] Rinanda Siregar, R. (2016). Konsep Bantuan Luar Negeri Cina ke Indonesia sebagai Kedok Investasi (Studi Kasus:



-
- Implikasi Pengiriman Tenaga Kerja Asing Cina). *Jurnal Hubungan Internasional*, 5(1), 50–59. <https://doi.org/10.18196/hi.2016.0085.50-59>
- [20] Setiawati, N., Santi, C., & Utami, M. (2021). Peranan Inter-Governmental Group On Indonesia (IGGI) dalam Perbaikan Perekonomian Indonesia Tahun 1967-1992. *Journal of Indonesian History*, 10(1), 87–94.
- [21] *The Jakarta Post* . (2021, November 5). Diambil kembali dari Indonesian government takesover land controlled by Tommy Soeharto This article was published in thejakartapost.com with the title "Indonesian government takes over land controlled by Tommy Soeharto ". Click to read: <https://www.thejakartapost.com/indonesia/2021/11/05/indonesian-government-takes-over-land-controlled-by-tommy-soeharto-.html>
- [22] *Trade Policy Review*. (2020, November 4). Diambil kembali dari The World Trade Organization: https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s401_e.pdf